

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen dan Peraturan dan Undang-undangan:

Dokumen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 Tahun 2011 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perizinan dan Non Perizinan

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Perizinan dan Sertifikasi Bidang Kesehatan

Peraturan Daerah Kota Depok No 8 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kecamatan

Peraturan Walikota Depok Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Buku dan Jurnal :

Muhammad Sawir, Birokrasi Pelayanan Publik Konsep, Teori, Dan Aplikasi, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020, hal. 83

Harbani Pasolong, 2017, *Teori Administrasi Publik*, Bandung: Alfabeta, Hal 148

Rahardjo Adisasmita, 2009. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*.

Penerbit PPKED : Makassar

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R &D*, Bandung: Alfabeta,

2011. Hal.85

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: PT

Alfabet, 2016, hal.93

Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2015,

hal. 249

Syahrudin, *Implementasi Kebijakan Publik*, Badnung: Nusa Media, 2019, hal 74

Erwin, *Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan Pada Dinas Penanaman Modal*

Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar. Makassar. 2020, Hal 39

Erwin, *Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan Pada Dinas Penanaman Modal*

Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar. Makassar. 2020, Hal 40

Erwin, *Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan Pada Dinas Penanaman Modal*

Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar. Makassar. 2020, Hal 42

Evi Wahyuni , Nathasia May Afistha , dan Ertien Rining Nawangsari, 2020, *Model*

Peningkatan Pelayanan Publik Pada Instansi Pemerintah Di Indonesia, Jurnal

Sosial Ekonomi dan Politik Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur,

Indonesia

Yulianto, 2020, *Meningkatkan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Publik Menuju Era New Normal*, Jurnal: Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Fatah Hidayat, Sutomo, Bagus Sigit Sunarko, 2018, *Implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP): Pendelegasian Kewenangan Setengah Hati (Studi Terhadap Penyelenggaraan PTSP Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuwangi)*, Program Magister Ilmu Administrasi, FISIP, Universitas Jember

Website

<https://depok.go.id/>

<https://perizinanonline.depok.go.id/>

<https://dpmptsp.depok.go.id/>



LAMPIRAN 1

PEDOMAN WAWANCARA

PELAYANAN PEDOMAN WAWANCARA MENGGUNAKAN TEORI

MENURUT LENVINE 2008

Indikator	Sekretaris Dinas DPM-PTSP Kota Depok	Koordinator Data dan Informasi	Dokter / Dokter Gigi
Renponsiveness (Daya Tanggap)	Bagaimana respon pegawai terhadap masyarakat yang mengurus perizinan SIP?	Apakah pegawai melakukan pelayanan dengan baik?	Apakah petugas melakukan pelayanan dengan cepat?
	Adakah hambatan yang terjadi ketika masyarakat mengurus perizinan SIP? Kalau ada, bagaimana cara penanggulangannya?	Apakah pegawai sudah melayani masyarakat sesuai SOP yang berlaku?	Apakah ada cara petugas memberi tahu apabila SIP sudah jadi?
	Adakah pelatihan khusus untuk para	Bagaimana cara pegawai merespon	Apakah masyarakat

	<p>pegawai guna merealisasikan pelayanan yang baik kepada masyarakat?</p>	<p>masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan dalam mengurus perizinan SIP?</p>	<p>nyaman dalam proses pembuatan SIP berbasis digital ini?</p>
<p>Responsibility (Responsibilitas)</p>	<p>Apa pedoman (dasar hukum) terkait prosedur pelayanan perizinan SIP?(regulasi dari pusat)</p>	<p>Bagaimana cara pegawai memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat?</p>	<p>Bagaimana pelayanan yang diberikan petugas ketika mengurus pembuatan SIP</p>
	<p>Bagaimana cara DPMPTSP menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat baik dari mutu, waktu dan prosedur?</p>	<p>Apakah masyarakat sudah mengikuti aturan yang berlaku dalam mengurus perizinan SIP?</p>	<p>Bagaimana penyelesaian petugas dalam pembuatan SIP? Apakah sudah sesuai dengan waktu</p>

			yang berlaku atau tidak?
	Apakah pelayanan yang diberikan DPMPTSP sudah baik dalam melayani masyarakat yang mengurus perizinan SIP?	Adakah kendala yang dihadapi oleh pegawai dalam melayani masyarakat?	Apakah ada kendala yang dirasakan masyarakat terkait pembuatan SIP?
Akuntability (Akuntabilitas)	Bagaimana DPMPTSP mengukur kepuasan masyarakat terkait dengan pelayanan perizinan SIP?	Apakah pegawai sudah memberikan arahan yang tepat kepada masyarakat?	Apakah pelayanan yang diberikan petugas sudah sesuai SOP yang berlaku?
	Apakah proses penyelenggaraan pelayanan berbasis	Bagaimana cara pegawai memberikan informasi kepada masyarakat untuk	Apakah petugas sudah memberikan informasi yang jelas

	digital ini sudah baik?	mengurus perizinan SIP?	terkait pembuatan SIP?
	Adakah sosialisasi kepada masyarakat setiap tahunnya dalam mengurus perizinan SIP?	Adakah kotak keluhan/pengaduan masyarakat terkait pelayanan di DPMPTSP?	Apakah sarana dan prasarana dari DPMPTSP sudah cukup bagus?



LAMPIRAN 2

TRANSKIP WAWANCARA

1. Bapak Rahman Pujiarto, S.Pd, M.Si selaku Sekertaris Dinas DPM-PTSP

Kota Depok

INDIKATOR	PERTANYAAN	JAWABAN
Responsiveness (Daya Tanggap)	Bagaimana respon pegawai terhadap masyarakat yang mengurus perizinan SIP	Pegawai sangat antusias terhadap setiap pekerjaan yang diberikan/diterima, jadi bisa dikatakan respon terhadap masyarakat baik.
	Adakah hambatan yang terjadi ketika masyarakat mengurus perizinan SIP? Kalau ada, bagaimana cara penanggulangannya?	Setiap perizinan pasti ada hambatan, tergantung permasalahan yang dihadapi masyarakat tersebut. Kalau misalkan terkait dengan administrasi biasanya kami merespon dengan cukup baik, memberikan penjelasan. Kalau terkait dengan teknis itu biasanya kita

		konsultasi dengan dinas yang terkait.
	Adakah pelatihan khusus untuk para pegawai guna merealisasikan pelayanan yang baik kepada masyarakat?	Iya ada, kita sudah melaksanakan dua kali kegiatan pelatihan terkait dengan pelayanan publik dan itu dilakukan di universitas indonesia.
Responsibility (Responsibilitas)	Apa pedoman (dasar hukum) terkait prosedur pelayanan perizinan SIP?(regulasi dari pusat)	Kalau regulasi dari pusat ini untuk Surat Izin Praktik kita dari Kementrian Kesehatan ya. Kemudian terkait dengan perizinannya itu ada di PERDA kami yaitu tentang perizinan dan non perizinan dan juga PERDA tentang pelimpahan kewenangan.
	Bagaimana cara DPMPTSP menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat	Kita menggunakan Standar Operasional Prosedur sih mas, disitu SOPnya sudah

	<p>baik dari mutu, waktu dan prosedur?</p>	<p>ditetapkan berapa hari kerja untuk semua perizinan. Termasuk untuk SIP ini kita juga memberikan jaminan itu akan selesai dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan dalam SOP kami. Untuk menjaga konsistensinya sendiri itu kita memberikan monitoring terhadap pegawai.</p>
	<p>Apakah pelayanan yang diberikan DPMPTSP sudah baik dalam melayani masyarakat yang mengurus perizinan SIP?</p>	<p>Kalau dari sisi kami pasti kami akan menjawab sudah baik, tetapi kalau dari sisi masyarakat sendiri bisa kita katakan baik apabila ada feedback dari masyarakat itu sendiri. Kami juga sudah membuat yang namanya IKM</p>

		(Indeks Kepuasan Masyarakat) nah dari situ kita bisa melihat respon dari masyarakat bagaimana pelayanan yang sudah kita berikan.
Akuntability (Akuntabilitas)	Bagaimana DPMPTSP mengukur kepuasan masyarakat terkait dengan pelayanan perizinan SIP?	Kami mengukur kepuasan masyarakat dengan IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
	Apakah proses penyelenggaraan pelayanan berbasis digital ini sudah baik?	Sesuai dengan yang namanya proses ya mas kita berusaha menyelenggarakannya dengan sebaik mungkin, tapi kalau dalam prakteknya kalau ada kendala itu akan kami benahi
	Adakah sosialisasi kepada masyarakat setiap tahunnya	Kita memberikan sosialisasi itu melalui

	dalam mengurus perizinan SIP?	elektronik atau dari web kami
--	----------------------------------	----------------------------------



2. Bapak Irwansyah, S.KOM selaku Kepala Bidang Pelayanan

INDIKATOR	PERTANYAAN	JAWABAN
<p>Responsiveness (Daya Tanggap)</p>	<p>Apakah pegawai melakukan pelayanan dengan baik?</p>	<p>Ya, sudah cukup baik karena petugas memberikan pelayanan sesuai dengan SOP DPM-PTSP Kota Depok</p>
	<p>Apakah pegawai sudah melayani masyarakat sesuai SOP yang berlaku?</p>	<p>Ya, petugas sudah melayani masyarakat yang ingin mengurus pembuatan SIP ini sesuai dengan SOP yang berlaku.</p>
	<p>Bagaimana cara pegawai merespon masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan dalam mengurus perizinan SIP?</p>	<p>Kalau persyaratannya tidak lengkap maka akan dikembalikan lagi ke masyarakat yang mengurus SIP ini, dan kami akan memberitahu dokumen apa yang harus dipenuhi lagi, baru akan kami proses lebih lanjut sampai SIPnya jadi.</p>

<p>Responsibility (Responsibilitas)</p>	<p>Bagaimana cara pegawai memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat?</p>	<p>Kalau untuk sekarang ya mas, kan kita sudah berbasis digital semua ya. Jadi setiap masyarakat yang mengurus SIP ini akan langsung ditangani oleh para operator, nah dari operator sendiri sampai sekarang sudah cukup baik melayani masyarakat. Kalau memang dari operatornya sendiri tidak merespon dengan baik akan dikenakan sanksi oleh pimpinan. Karena kita juga tetap mengontrol bagaimana kinerja dari operator sendiri.</p>
	<p>Apakah masyarakat sudah mengikuti aturan yang berlaku dalam mengurus perizinan SIP?</p>	<p>Ya, kalau itu si otomatis mas. Karena kalau masyarakat tidak mengikuti aturan yang berlaku itu akan sulit kita proses.</p>

	Adakah kendala yang dihadapi oleh pegawai dalam melayani masyarakat	Kendala yang masih sering kita hadapi yaitu masyarakat masih sering kurang dalam persyaratan yang sudah kita tetapkan untuk membuat SIP ini.
Akuntability (Akuntabilitas)	Apakah pegawai sudah memberikan arahan yang tepat kepada masyarakat?	Sudah mas, salah satu contohnya ada masyarakat yang masih kurang paham dengan teknologi ya mas. Nanti dari pegawai kita membantu mengarahkan apabila masyarakat tersebut tidak bisa melakukan pendaftaran secara online.
	Bagaimana cara pegawai memberikan informasi kepada masyarakat untuk mengurus perizinan SIP?	Kita memberikan informasi kepada masyarakat melalui web kita sendiri sih mas yaitu Si-MPOK disitu sudah jelas informasi terkait perizinan SIP sendiri. Kalau misalkan secara manual

		atau offline kita akan membantu lewat operator yang disediakan diloket.
	Adakah kotak keluhan/pengaduan masyarakat terkait pelayanan di DPMPTSP?	Ada mas, itu sudah disediakan didekat loket agar kita juga ada masukan atau saran dari masyarakat yang mengurus perizinan.



3. Dr. Ika Herayana Noviani selaku Masyarakat yang membuat Surat Izin

Praktik

INDIKATOR	PERTANYAAN	JAWABAN
Responsiveness (Daya Tanggap)	Apakah petugas melakukan pelayanan dengan cepat?	Ya, menurut saya petugas pelayanan sudah melakukan pelayanan dengan cepat
	Apakah ada cara petugas memberi tahu apabila SIP sudah jadi?	Ada mas, petugas memberitahu SIP kita bila sudah jadi lewat SMS.
	Apakah masyarakat nyaman dalam proses pembuatan SIP berbasis digital ini?	Enak sih mas, apalagi kita sedang menghadapi masalah pandemi gini ya mas, jadi lebih baik online dibanding offline mas.
Responsibility (Responsibilitas)	Bagaimana pelayanan yang diberikan petugas ketika mengurus pembuatan SIP?	Belum dikatakan baik si mas, Cuma sudah standart pelayanan si menurut saya
	Bagaimana penyelesaian petugas dalam pembuatan SIP? Apakah sudah sesuai	Kalau dari segi waktu mas menurut saya sudah cepat ya mas, karena memang jelas di situs web online sendiri

	dengan waktu yang berlaku atau tidak?	kita bisa memantau surat kita sudah sampai proses mana.
	Apakah ada kendala yang dirasakan masyarakat terkait pembuatan SIP?	Kalau untuk saya pribadi mas, saya tidak ada kendala sih mas karena memang saya banyak yang kenal di DPM-PTSP, jadi saya bisa nanya nanya langsung terhadap yang saya kenal gitu mas.
Akuntability (Akuntabilitas)	Apakah pelayanan yang diberikan petugas sudah sesuai SOP yang berlaku?	Sudah mas, karena kita sendiri memang dilayani petugas dengan baik.
	Apakah petugas sudah memberikan informasi yang jelas terkait pembuatan SIP?	Sudah mas, karena memang informasi yang tertera di website dari DPM-PTSP sendiri sudah cukup jelas, seperti dokumen apa saja yang harus kita lengkapi dan kita upload.

	<p>Apakah sarana dan prasarana dari DPMPTSP sudah cukup bagus?</p>	<p>Mungkin menurut saya sudah cukup bagus ya mas, cuma mungkin harus lebih diperbaiki dalam sarananya si mas saran saya.</p>
--	--	--



4. Drg. Era selaku Masyarakat yang membuat Surat Izin Praktik

INDIKATOR	PERTANYAAN	JAWABAN
Responsiveness (Daya Tanggap)	Apakah petugas melakukan pelayanan dengan cepat?	Sudah cepat mas menurut saya.
	Apakah ada cara petugas memberi tahu apabila SIP sudah jadi?	Ada, nanti kita dikabari lewat SMS mas.
	Apakah masyarakat nyaman dalam proses pembuatan SIP berbasis digital ini?	Nyaman mas, karena lewat online ini jadi kita gaperlu ribet lagi bolak-balik untuk ke DPM-PTSP, tidak makan waktu kita juga mas.
Responsibility (Responsibilitas)	Bagaimana pelayanan yang diberikan petugas ketika mengurus pembuatan SIP	Karena sekarang ini online ya mas kita lihat dari operator yang mengurus perizinan SIP ini sudah cukup baik sih mas.
	Bagaimana penyelesaian petugas dalam pembuatan SIP? Apakah sudah sesuai	Saya sudah 2 kali buat SIP ini mas, kalau untuk yang pertama itu sudah sangat cepat mas. Untuk yang

	dengan waktu yang berlaku atau tidak?	kedua menurut saya belum cukup cepat mas, mungkin karena faktor saya buatnya diakhir tahun kali ya banyak petugas yang libur.
	Apakah ada kendala yang dirasakan masyarakat terkait pembuatan SIP?	Tidak ada sih mas kendala yang saya rasakan untuk pembuatan SIP online ini. Cuma mungkin menurut saya kendala yang saya alami ketika pengambilan SIP yang sudah jadi mas, itu sangat ngantri mas. Saran saya mungkin harus membuat loket khusus untuk pengambilan, jangan disatukan mas dengan pembuatan juga gitu.
Akuntability (Akuntabilitas)	Apakah pelayanan yang diberikan petugas sudah sesuai SOP yang berlaku?	Sudah mas, menurut saya sudah sesuai SOP yang berlaku

	<p>Apakah petugas sudah memberikan informasi yang jelas terkait pembuatan SIP?</p>	<p>Sudah mas, terlebih saat saya pengambilan disitu petugas mengarahkan saya agar bisa mengambil SIP yang sudah jadi.</p>
	<p>Apakah sarana dan prasarana dari DPMPTSP sudah cukup bagus?</p>	<p>Sudah cukup bagus mas, cuma ya itu saya bilang untuk menambahkan loket khusus pengambilan mas.</p>



5. Drg. Vella Atika selaku Masyarakat yang membuat Surat Izin Praktik

INDIKATOR	PERTANYAAN	JAWABAN
Responsiveness (Daya Tanggap)	Apakah petugas melakukan pelayanan dengan cepat?	Sudah mas, respon dari petugas onlinenya sudah cukup cepat.
	Apakah ada cara petugas memberi tahu apabila SIP sudah jadi?	Ada mas, petugas memberi tahu kita lewat SMS mas.
	Apakah masyarakat nyaman dalam proses pembuatan SIP berbasis digital ini?	Sudah cukup nyaman sih mas, lebih enak online dibanding offline ya. Cuma ya kadang website suka error gitu mas.
Responsibility (Responsibilitas)	Bagaimana pelayanan yang diberikan petugas ketika mengurus pembuatan SIP?	Sudah cukup baik mas.
	Bagaimana penyelesaian petugas dalam pembuatan SIP? Apakah sudah sesuai dengan waktu yang berlaku atau tidak?	Sudah sesuai dengan waktu yang ditentukan mas, cuma kita juga harus tetap melihat proses surat kita sudah sampai mana gitu mas.

		Tetap harus kita kontrol gituu
	Apakah ada kendala yang dirasakan masyarakat terkait pembuatan SIP?	Kendala yang saya hadapi si hanya waktu itu pernah webnya error mas, mungkin harus lebih diperbaiki lagi ya untuk webnya
Akuntability (Akuntabilitas)	Apakah pelayanan yang diberikan petugas sudah sesuai SOP yang berlaku?	Sudah sesuai dengan SOP mas menurut saya.
	Apakah petugas sudah memberikan informasi yang jelas terkait pembuatan SIP?	Sudah jelas mas, informasi data apa saja yang harus kita upload. Dan kalau memang masih belum jelas kita bisa melakukan contact person yang sudah disediakan si mas.
	Apakah sarana dan prasarana dari DPMPSTP sudah cukup bagus?	Sudah sih mas, sudah cukup terstruktur juga sarananya.

LAMPIRAN 3

DOKUMENTASI















PEMERINTAH KOTA DEPOK

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) DOKTER / DOKTER GIGI

Nomor : 446/1022/SIPdokter/DPMPTSP/SIMPOK/VII/2022

Dasar :

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran
2. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perizinan Dan Non Perizinan
3. Rekomendasi dari : Dinas Kesehatan Kota Depok Surat No. **446/0893/SIP/SDMK/VII/2022** Tanggal **19 Juli 2022**.
4. Permohonan dari Darma Setyakusuma, bertindak untuk dan atas nama Sendiri dengan Nomor Pendaftaran : A040A0, tanggal 6 Juli 2022.

Diberikan Kepada :

DARMA SETYAKUSUMA

Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 12 Juli 1957
Alamat : Jl. Menteng Sukabumi RT. 007 RW. 003, Kel. Menteng, Kec. Menteng, Kota Adm. Jakarta Pusat, Dki Jakarta
Alamat Praktik : **Rumah Sakit Umum Puri Cinere**
Jl. Maribaya No. 1 Puri Cinere Kel Pangkalan Jati Baru
Kec Cinere Kota Depok Jawa Barat
Nomor STR : 3111604422039175
Nomor Rekomendasi OP : 138.3/REK/DS-NA/IDI/DPK/VI/2022
Untuk berpraktik sebagai : Dokter Spesialis Paru dengan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya**
SIP ke : 3 (Tiga)
Masa berlaku SIP : 12 Juli 2027

Dikeluarkan di : DEPOK
Pada Tanggal : 28 Juli 2022



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. Mangguluang Mansur, M.Si
Pembina Tingkat I/IVb
NIP. 19720407 199303 1 006

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan
2. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok
5. Organisasi Profesi







UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
TERAKREDITASI BAN-PT

Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520
Telp. (021) 70737624, 7806700 Ext.146, Fax. 7802718-7802719
Homepage : <http://www.unas.ac.id> Email : info@unas.ac.id

Nomor : 626/WD/ VI /2022

Jakarta, 23 Juni 2022

Lamp : -

Perihal : Permohonan Penelitian dan Informasi Data

Kepada Yth : Bapak/Ibu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok

Dengan hormat,

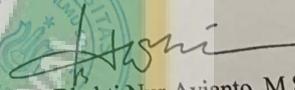
Bersama ini kami perkenalkan dengan hormat mahasiswa di bawah ini:

Nama : Ariz Rifaldi Anwar
Nomor Induk Mahasiswa : 173112351550131
Prodi/Konsentrasi : Administrasi Publik
Alamat Rumah : Griya Bukit Perdana Blok C No.1
HP : 081288911701

Mahasiswa tersebut bermaksud melakukan penelitian Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka penyusunan skripsi dengan Judul : **Pelayanan Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan Mikro Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok**
Dengan Dosen Pembimbing: Drs. Suranto, M.Si

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan bantuan seperlunya. Demikian atas perhatiannya dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wakil Dekan,


Dr. Bhakti Nur Avianto, M.Si

HASIL UJI TURNITIN

Nama : Ariz Rifaldi Anwar
Npm : 17311235110131
Prodi : Administrasi Publik

